

Optimalisasi Program Desa Informasi Melalui Penguatan Kelembagaan¹

S. Bayu Wahyono

Dosen Jurusan Teknologi Pendidikan UNY, dan Dosen
Sosiologi Pascasarjana serta Kajian Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana UGM
Email: bayu_wahyono@yahoo.com

Naskah diterima, 9 November dan disetujui 2 Desember 2011

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah program Desa Informasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) telah mencapai tujuan, yakni mampu memberikan layanan informasi yang mencerdaskan, memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan. Di samping itu, penelitian ini juga untuk mengetahui, apakah faktor kelembagaan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan atau kegagalan Desa Informasi. Riset yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan proses pengumpulan datanya mengandalkan pada observasi serta wawancara menghasilkan temuan bahwa program Desa Informasi belum mencapai hasil yang optimal. Faktor penyebabnya, program itu dilaksanakan dengan determinisme teknologi dan cenderung mengabaikan determinisme sosial budaya. Aspek kelembagaan yang mestinya berperan dalam pengelolaan selanjutnya Desa Informasi kurang mendapat perhatian.

Kata kunci: Desa Informasi, determinisme teknologi, determinisme sosial budaya, kelembagaan

¹ Pengambilan data untuk kepentingan penulisan jurnal ini dilakukan oleh Penulis bersamaan dengan Kegiatan Monitoring Desa Informasi yang diselenggarakan atas kerjasama Ditjen Informasi Komunikasi Publik (IKP), Kemen Kominfo dengan Prodi Sosiologi Pascasarjana FISIPOL UGM pada Mei 2011 di mana Penulis terlibat di dalamnya.

Optimization of the Information Village Program through the Strengthening of Institutional Aspect

Abstract

This research was conducted with the aim to determine whether the Village Information program organized by the Ministry of Communications and Information Technology has reached the goal, namely to provide information services that educate, empower and improve the economy of the rural population. In addition, this research is also to find out whether institutional factor be the deciding factor in the success or failure of the Village Information. Research was conducted with qualitative approaches, and data collection process relied on observations and interviews. The result shows that the Information Village program has not reached the optimal results. It's due to the program was implemented with technology determinism and tends to ignore social and cultural one. Institutional aspects that should play a role in the subsequent management of the Village Information received less attention.

Key words: Information Village, technology determinism, social cultural determinism, institutional

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata melalui pemberian akses informasi dan komunikasi yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah membangun infrastruktur telekomunikasi secara kontinyu, dan tahap demi tahap yang merambah ke seluruh pelosok tanah air. Pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi itu dianggap vital dalam upaya menuju masyarakat informasi yang telah menjadi sebuah keniscayaan dalam era globalisasi sekarang ini.

Memasuki melinium ketiga, pemerintah telah membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi hingga ke masyarakat desa. Perluasan pembangunan infrastruktur itu dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara masyarakat desa dan kota. Asumsi pemerintah, jika kesenjangan informasi antara desa dan kota tidak segera diatasi akan mengganggu kelancaran pembangunan nasional. Kesenjangan informasi antara kota dan desa akan menimbulkan kesenjangan pula di bidang pembangunan secara keseluruhan, dan hal itu bisa mengganggu harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna mengurangi tingkat kesenjangan

informasi kota dan desa, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengembangkan program Desa Informasi.

Melalui program Desa Informasi diharapkan dapat semakin mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan pembangunan perekonomian warga masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi. Desa Informasi merupakan program Kementerian Kominfo yang difokuskan pada pembangunan fasilitas telekomunikasi dan informatika di desa-desa terpencil, khususnya yang berada di wilayah-wilayah perbatasan RI dengan negara-negara tetangga. Sejak dicanangkan pada 2009, Kementerian Kominfo menargetkan pelaksanaan 500 Desa Informasi hingga tahun 2014. Dalam peresmian di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Tifatul Sembiring meresmikan secara simbolik 14 Desa Informasi yang terletak di berbagai wilayah perbatasan RI. Keempatbelas Desa Informasi yang telah diresmikan itu adalah, lima desa di Provinsi Kalimantan Barat, empat desa di Kalimantan Timur, satu desa di Kepulauan Riau, satu desa di Nusa Tenggara Timur, satu desa di Sulawesi Utara, satu desa di Papua, dan satu desa di Maluku Utara.

Dengan membangun Desa Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial serta ekonomi dalam upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, pengembangan wila-

yah dan masyarakat, dan menjembatani kesenjangan digital. Terintegrasi dengan Desa Berdering antara lain, seperti Desa “Pinter” (Desa Punya Internet), Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang memberikan layanan akses informasi di seluruh kecamatan untuk informasi cuaca, harga komoditas, pendidikan dan kebutuhan lainnya dalam rangka kemudahan informasi untuk masyarakat, Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat, dan penyelenggaraan TV Broadcast berbasis kebutuhan masyarakat, serta berbagai program pelayanan informasi lainnya.

Sementara itu, Kemkominfo sejak 2003 juga mempunyai program yang dikenal dengan Desa Berdering. Melalui KPU/USO telah membangun fasilitas telekomunikasi di 2013 desa pada tahun 2003, dan 2341 desa pada tahun 2004 yang tersebar di berbagai propinsi. Prioritas utama sasaran program ini adalah desa-desa yang masuk kategori daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan daerah perintisan serta daerah yang tidak layak secara ekonomi. Adapun pengembangannya diarahkan pada pusat pemerintahan, pusat pelayanan kesehatan, pendidikan, sentra industri dan sentra pertumbuhan, kebutuhan masyarakat dan lain-lain yang dipandang perlu.

Akan tetapi sebagai program baru, Desa Informasi dan Desa Berdering, serta berbagai program pengembangan informasi dan komunikasi dihadapkan pada berbagai permasalahan, mulai dari hal-hal yang bersifat teknologis hingga aspek sosial-budaya. Dalam kasus Desa

Informasi, setelah 14 lokasi telah diresmikan, perangkat kerasnya ada juga yang sudah rusak baik disebabkan oleh bencana alam maupun karena kesalahan operasional. Dari aspek sosial-budaya, kesiapan masyarakat dalam menerima program ini juga masih menyodorkan berbagai persoalan, seperti masih belum berkembangnya rasa memiliki terhadap fasilitas publik, belum berkembangnya kesadaran bahwa sarana informasi berpotensi sebagai sarana kreasi dan inovasi, kemampuan berorganisasi masyarakat desa yang masih rendah, spirit enterpreneurship warga desa yang rendah, dan yang terpenting adalah lemahnya aspek kelembagaan dalam mengelola infrastruktur telekomunikasi untuk kepentingan produktif. Semua permasalahan itu bermuara pada persoalan masih belum termanfaatkannya secara optimal bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan, sebagai akibat lemahnya aspek pembangunan kelembagaan.

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi menuju masyarakat informasi bukanlah tugas yang mudah, melainkan akan banyak menemui hambatan. Kondisi sosial ekonomi dan kultur yang berkembang dalam masyarakat Indonesia masih jauh dari kriteria yang dituntut oleh sebuah masyarakat informasi. Kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat masih fenomenal dan bahkan ada kecenderungan makin melebar. Sementara itu kultur agraris yang masih dominan berkembang dalam masyarakat

merupakan kenyataan yang kurang sesuai dengan tuntutan masyarakat informasi. Oleh karena itu, kehadiran telekomunikasi dalam suatu masyarakat yang secara sosial-ekonomi nonegaliter dan tidak diikuti oleh transformasi budaya, hanya akan menyodorkan fenomena kesenjangan sosial-ekonomi yang makin melebar dan munculnya *cultural shock*.

Munculnya berbagai persoalan sosial budaya berkaitan dengan penyelenggaraan program Desa Berdering dan Desa Informasi, tidak menyurutkan niat Pemerintah untuk terus membangun infrastruktur telekomunikasi di pedesaan. Dalam dua tahun ke depan, ditargetkan akan membangun 50 Desa Informasi sebagai realisasi program penyediaan infrastruktur telekomunikasi jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan munculnya berbagai persoalan sosial-budaya yang timbul bersamaan dengan pembangunan Desa Informasi di satu sisi, dan di lain pihak sekaligus mendukung program Desa Informasi di masa mendatang agar tepat sasaran, maka studi komprehensif yang melihat dari aspek penguatan kelembagaan terasa besar nilai urgensinya. Bagaimanapun fasilitas teknologi yang akan memanfaatkan adalah manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, kesiapan secara sosial-budaya dalam menerima hadirnya teknologi baru adalah persoalan yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu sendiri.

Selama ini peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam peru-

bahan sosial budaya, selalu ditempatkan pada posisi di mana teknologi merupakan faktor yang sangat penting. Pandangan yang determinisme teknologi semacam itu mendominasi dalam kasanah kajian TIK selama ini, sehingga jarang sekali kajian dari aspek sosial-budaya. Padahal, pada dasarnya teknologi adalah merupakan bagian dari masyarakat itu, sebuah hasil konstruksi rekayasa masyarakat, bukan sebuah gejala yang terpisah dari konteks sosial budaya.

Akan tetapi membangun desa informasi tidak semudah yang dibayangkan, terdapat sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan, antara lain masalah penguatan kelembagaan. Tulisan ini akan mendiskusikan beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi Desa Informasi di lapangan. Apakah faktor kelembagaan menjadi salah satu faktor menentukan dalam keberhasilan pengelolaan desa informasi. Artinya, apakah dengan memperhatikan faktor kelembagaan program ini akan dapat benar-benar membawa pengaruh positif bagi upaya pemerintah meningkatkan dinamika kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Permasalahan

1. Apakah program Desa Informasi telah mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti mampu memberikan layanan informasi yang mencerdaskan serta memberdayakan perekonomian warga pedesaan?
2. Faktor-faktor apa yang menentukan

keberhasilan dan kegagalan program Desa Informasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan?

3. Apakah aspek kelembagaan menjadi faktor yang menentukan dalam keberhasilan dan kegagalan program Desa Informasi?

KERANGKA TEORETIK

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini patut disebut revolusi teknologi informasi, karena keberhasilannya dalam masuk pada semua aktivitas kehidupan manusia, tidak hanya sebagai sumber pengaruh dari luar, tetapi sebagai bagian dari segala aktivitas manusia terjalin. Jaringan teknologi informasi dan komunikasi memerluas habitat manusia. Jarak fisik dan waktu menyempit, demikian pula "jarak" ekonomi, politik, sosial dan budaya, tetapi pengalaman keseharian manusia tetap mengakar dalam lokalitas. Antara jaringan (*the net*) dan diri (*the self*) terjadi tarik menarik. Lingkungan ekonomi sosial politik budaya mengglobal dan semakin terbuka sehingga sebagai reaksi, kebutuhan psikologis manusia akan identitas, lokalitas dan familiaritas termasuk di dalamnya rasa nyaman, dikenal dan diterima cenderung meningkat (Castells dalam Tumenggung, 2005: 5).

Dalam keterlemparannya di tengah proses globalisasi inilah, diri yang makin terisolasi dan bingung butuh merekonstruksi identitasnya yang tercecer. Manusia abad informasi tak bisa lagi berlindung di tengah tradisi keluarga besar atau suku yang tinggal bertetangga

dalam satu kampung. Tidak ada komunitas homogen di suatu wilayah informasional, baik tradisi, akar budaya, asal-usul, maupun religi. Akan tetapi manusia adalah makhluk sosial. Identitas dan kebersamaan kelompok tetap merupakan kebutuhan psikologi yang tidak tergantikan. Ini mendorong terbentuknya komunitas-komunitas virtual. Ekspresi kebutuhan ini juga tampak dalam gerakan berbasis media dari internet, telepon seluler, radio komunitas, *news letter* dan *mailing list*.

Masyarakat Indonesia yang heterogen belum sepenuhnya menjadi masyarakat informasional yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Kelas ekonomi atas, atau yang tinggal di perkotaan mungkin sudah menggunakan jaringan media interaktif—akses internet cepat dengan *bandwith* lebih besar, televisi kabel, telepon seluler sekaligus multimedia. Namun mayoritas masyarakat miskin di Indonesia akses informasi dengan teknologi masih jauh.

Van Dijk membagi 4 strategi pengembangan ICT di dunia, yakni: (1) *state approach* (mengutamakan pengembangan genre baru ICT); (2) *leap frogging strategy* (akselerasi pengembangan genre baru ICT); (3) *organic development strategy* (penggunaan ICT konvensional plus pengembangan genre baru ICT secara gradual; dan (4) *combination* (kombinasi berbagai strategi). Dari keempat strategi ini maka yang sejalan dengan kasus di Indonesia adalah strategi ke tiga, yakni *organic development strategy*.

Kajian terhadap faktor ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat di Indonesia sangat membutuhkan data empirik dan dokumentatif untuk melihat penetrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup yang lebih kontekstual. Kondisi ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat dilihat pada lokasi atau wilayah geografis saja, tetapi juga melihat penetrasi teknologi itu dalam masyarakat. Misalnya, melalui gratifikasi masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi, serta penetrasi dari bisnis informasi dan telekomunikasi itu sendiri pada wilayah tersebut, serta kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi teknologi informasi dan komunikasi, baik konsumsi dalam arti pengadaan/pembelian teknologi maupun latar belakang pendidikannya.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat secara meluas dan optimal bagi kepentingan produktif bukanlah semata-mata merupakan persoalan teknis seperti bagaimana orang harus dibekali kemampuan teknik-operasional, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu merupakan perilaku budaya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan erat dengan aspek sosial dan budaya masyarakat, yakni bagaimana agar masyarakat secara mental dan kultural siap menerima hadirnya sistem atau teknologi baru, sehingga tidak memunculkan keterkejutan budaya (*culture shock*). Munculnya gejala gegar budaya sebagai implikasi hadirnya

teknologi canggih, dapat menimbulkan kerugian besar, tidak saja secara ekonomi karena pengadaan perangkat kerasnya sangat mahal, tetapi juga secara kultural, dalam arti hilangnya kultur mandiri dan produktif yang berubah menjadi objek dari teknologi canggih. Karakter masyarakat yang sebelumnya mampu menjadi subyek dalam mengatasi persoalan hidup sehari-hari, bergeser menjadi masyarakat yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap teknologi.

Salah satu masalah sosial yang paling mendasar dan senantiasa menjadi kendala utama dalam usaha menjadi bangsa yang maju, adalah terus mapannya struktur sosial yang non-egaliter. Membangun kemajuan bangsa dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terus gagal karena terganjal oleh struktur sosial yang timpang. Memang demikianlah, tidak mungkin kita akan berhasil menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, jika tidak diawali dengan menciptakan struktur sosial yang egaliter.

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan produk teknologi tinggi dan modern yang berasal dari negara-negara maju. Bagi masyarakat Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi merupakan inovasi yang diintrodusir secara meluas kepada masyarakat sejak pertengahan dekade 1990-an. Tawaran teknologi informasi dan komunikasi lebih masif lagi ketika masuk melinium ketiga, di mana pemerintah telah membangun jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi hingga ke daerah

pedesaan, terutama yang berkaitan dengan telekomunikasi.

Teknologi telah merasuk dalam kehidupan masyarakat, dan dengan terpaksa, suka atau tidak suka, orang harus beradaptasi dengan teknologi tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengubah kultur masyarakat. Mempersiapkan masyarakat dalam menerima realitas tersebut sebagai bagian dalam kehidupannya menjadi hal yang penting. Misalnya, kultur *face to face* yang mengandalkan kultur lisan berubah ke dalam *telephone interaction*, atau kultur *face to face* yang mengandalkan kultur lisan menjadi *electronic interaction* melalui e-mail, sehingga menjadi kultur tersendiri, yaitu kultur menulis. Hal tersebut menjadi kendala bagaimana sebuah *e-government* yang dikembangkan oleh pemerintah daerah tidak banyak digunakan oleh masyarakat daerah tersebut, karena kultur yang berbeda dengan layanan yang konvensional. Data menunjukkan bahwa mayoritas Pemerintah Daerah di Indonesia telah mengembangkan *e-government* sebagai konsekuensi dari layanan transparan dan akuntabel, tetapi mengalami kendala yang utama pada kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikan dan masyarakat yang menggunakannya (Sumber Majalah e-Indonesia).

Kemampuan dalam membaca dan menulis (melek huruf) dan kemampuan menyusun kalimat menjadi hal yang penting. Belum lagi persoalan teknis tentang penggunaan perangkat kerasnya, bukan persoalan pengadaan, tetapi

bagaimana menyiapkan orang terbiasa menggunakan teknologi sebagai bagian kerja yang utama. Mengubah kultur tidak dapat dilakukan secara sekejap melalui *workshop* dengan jangka waktu pendek.

Tingkat pengetahuan seseorang mengenai suatu ide baru atau inovasi juga dipengaruhi oleh intensitas hubungan dengan orang-orang yang tergolong inovator atau agen pembaruan, dan tingkat persinggungannya dengan media massa. Masyarakat yang tingkat media *eksposure*-nya tinggi relatif cepat terbuka dan cepat dalam mengadopsi teknologi tinggi (McQuail & Windahl, (1995). Jadi dalam masyarakat urban yang lebih banyak peluang mengakses informasi melalui media massa, relatif lebih cepat dalam menerima dan memanfaatkan teknologi baru ketimbang masyarakat pedesaan.

Pola komunikasi mengikuti karakteristik struktur sosialnya. Jika struktur masyarakat bersifat egaliter, maka pola komunikasinya akan bersifat setara, dialog, dan memberi peluang terjadinya umpan balik. Sebaliknya, jika karakter masyarakat bersifat non-egaliter maka pola komunikasinya juga akan bersifat searah, *top-down*, dan kurang memberi peluang berkembangnya umpan balik.

Informasi yang bernilai ekonomi akan cenderung dihambat oleh struktur masyarakat lapisan masyarakat atas. Akses masyarakat level bawah terhadap informasi yang bernilai ekonomis semakin kecil, karena dihambat oleh kepentingan struktur masyarakat level atas. Sebagai ilustrasi, soal informasi harga kebutuhan pokok di pasar di luar

wilayah petani akan dikuasai oleh para tengkulak. Dengan kata lain, tengkulak ini merupakan kelompok yang *well informed* terhadap berbagai informasi harga komoditas. Demikian pula, masyarakat level atas juga mempunyai peluang lebih besar dalam mengakses informasi di seputar pasar modal, perbankan, dan valuta asing. Tak terkecuali elite politik, mereka inilah yang punya akses besar terhadap berbagai informasi yang bersifat strategis, seperti perencanaan tata kota, berbagai kebijakan politik-ekonomi, dan berbagai bantuan dana. Bahkan elite politik inilah yang menguasai jaringan informasi yang bernilai strategis. Sering kali kelompok ini menjaling kolaborasi dengan kalangan pebisnis dan membuka usaha.

Bangsa Jepang berhasil mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang cukup signifikan sebagaimana kita lihat sekarang, karena sejak awal sudah timbul kesadaran bahwa membangun struktur masyarakat yang egaliter adalah prasyarat meraih kemajuan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu ketika akan memulai revolusi Meiji, kelas Samurai Jepang dengan sukarela membagi-bagikan asetnya kepada rakyat yang menjadi bagian dari usaha menghilangkan struktur sosial yang timpang.

Sebagaimana bangsa Jepang, ilmu pengetahuan dan teknologi sejak awal sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Jepang, karena sejak awal program transfer teknologi dari Barat, seluruh masyarakat bisa mengakses dan

sekaligus bisa menikmati manfaatnya. Tidak seperti yang kita lakukan selama ini, transfer teknologi yang diyakini sebagai upaya utama meraih kemakmuran, tidak didahului dengan membangun basis sosial yang egaliter. Akibatnya, pelaku dan yang menikmati transfer teknologi itu hanya dinikmati oleh golongan kelas atas. Akhirnya semua tahu, bahwa kita gagal melakukan transfer teknologi, karena tidak terjadi proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi secara kultural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mengetahui bagaimana makna keberadaan program Desa Informasi dalam pandangan warga pedesaan yang menjadi sasaran program. Adapun proses pengumpulan data mengandalkan metode observasi dan wawancara. Observasi dilakukan pada seputar lokasi pemasangan infrastruktur telekomunikasi dalam upaya mengetahui kondisi peralatan, dan observasi lingkungan pedesaan pada umumnya untuk mengetahui seberapa jauh program Desa Informasi berdampak pada kehidupan sehari-hari. Sementara itu wawancara dilakukan pada segenap informan kunci, seperti pengelola program, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan informan lain yang dianggap mengetahui program Desa Informasi.

Dalam riset yang sudah dilakukan, pelaksanaan desa informasi dievaluasi secara komprehensif. Namun, untuk

penulisan artikel ini Penulis hanya memfokuskan pada aspek kelembagaan.

PEMBAHASAN

Desa informasi merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimaksudkan untuk mendukung proyek palapa ring di daerah-daerah terpencil dan wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Desa Informasi merupakan gabungan dari Desa Berdering, Desa PINTER (Desa Punya Internet), Radio Komunitas, Pemberdayaan KIMTAS (Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan), Media Center, TV Penerima Siaran Berlangganan, Media Pertunjukan Rakyat, dan M-CAP (Mobile Community Access Point).

Adapun tujuan dibangunnya desa informasi, *yaitu*: (1) menghilangkan kesenjangan informasi di daerah perbatasan, daerah terpencil dan terluar, serta meningkatkan ketahanan informasi dalam kerangka NKRI; (2) meningkatkan pola pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi; dan (3) meningkatkan peranan kelompok - kelompok yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, tujuan jangka panjang pembangunan desa informasi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan perekonomian warga di wilayah perbatasan. Dalam konteks visi dan misi Kementerian Kominfo, pembangunan desa informasi merupakan suatu upaya untuk mewujudkan

komunikasi lancar, informasi benar bagi seluruh rakyat menuju terbentuknya masyarakat informasi di Indonesia.

Proyek desa informasi membutuhkan biaya cukup tinggi untuk setiap desa, separuhnya diperuntukkan bagi pembelian Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) yang penggunaannya berpindah dari satu titik ke titik lain agar setiap lapisan masyarakat dapat melakukan akses internet. Proyek ini dimulai sejak 2009 dan pada tahun 2010 Kementrian Kominfo berhasil membangun 14 desa informasi yang tersebar di sejumlah wilayah provinsi di Indonesia. Pada akhir 2011 Kemen Kominfo menargetkan selainya pembangunan 64 desa informasi di seluruh Indonesia.

Sejumlah desa yang diresmikan pada tahun 2010, yaitu Desa Senaning, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang; Desa Nibong, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas; Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang; Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu; Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau; Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur; Desa Liang Butan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan; Desa Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau; Desa Tanjung, Kecamatan Bungutan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Desa Lenganeng, Keca-

matan Tabukan Timur, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara; Desa Sota, Kecamatan Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, serta Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten P Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Dalam studi ini beberapa program dievaluasi, yakni Desa Berdering, Desa Pinter (Desa Punya Internet), PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan), Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Radio komunitas dan TV broadcast/indovision. Dari 14 Desa Informasi yang telah dioperasikan, dipilih 6 desa, yaitu meliputi: Desa Rupert, Kepulauan Riau; Desa Sajingan, Kalimantan Barat; Desa Sota, Desa Yayasan, Maluku Utara; Desa Silawan, NTT; Desa Lenganeng, Sulawesi Utara.

Setelah melakukan studi lapangan dan evaluasi, secara umum dapat dikatakan bahwa implementasi program Desa Informasi di 6 lokasi dapat dikatakan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Respon masyarakat terhadap program desa informasi dapat dikatakan masih sangat kurang. Fasilitas telekomunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengakses informasi yang berguna bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan warga dan peningkatan wawasan kebangsaan yang menjadi tujuan utama Desa Informasi masih belum tercapai secara optimal.

Penyebab utama belum optimalnya pencapaian keberhasilan yang tinggi dari tujuan program ini, karena kurang memperhatikan aspek sosial budaya, terutama

tidak dilakukannya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan. Sejak awal terkesan, program ini dijalankan dengan pendekatan determinisme teknologi sehingga kurang memperhatikan partisipasi publik. Akibat kurang adanya partisipasi, maka banyak warga yang tidak mengetahui bahwa di desa mereka telah tersedia jaringan telekomunikasi yang dapat dipergunakan untuk mengakses informasi untuk meningkatkan pengetahuan maupun kesejahteraan mereka.

Pada tataran pengambilan keputusan untuk membangun desa informasi ditemukan bahwa prosesnya masih bersifat *topdown*. Alurnya dapat dijelaskan bahwa keputusan dibuat oleh Pusat, kemudian baru melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, selanjutnya dilaksanakan pemasangan fasilitas dan jaringan telekomunikasi. Setelah itu dilakukan sosialisasi kepada komunitas yang menjadi sasaran. Dengan begitu desa informasi diharapkan bisa berjalan dan mencapai target yang ditetapkan.

Bahkan pada tingkat koordinasi dengan pemangku kepentingan, terutama antarbidang yang menangani infrastruktur dan yang mengelola isi dan program pun ternyata pelaksanaannya kurang intensif. Secara riil koordinasi dengan mitra strategis di daerah seperti Infokom, aparat setempat, dan lembaga publik di tingkat desa memang telah dilakukan, tetapi belum intensif dan kurang ada kontinuitas sehingga terkesan spontan dan insidental. Program-program desa informasi yang semestinya dimaksudkan

untuk meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat yang pada tahap selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan akhirnya tidak dipahami karena minimnya sosialisasi.

Pemasangan perangkat keras dan jaringan telekomunikasi memang sudah terlaksana dengan baik, tetapi pemilihan lokasi kurang tepat karena tidak melibatkan warga setempat. Kebanyakan dalam menentukan lokasi untuk menempatkan stasiun radio komunitas, tv indovision, fasilitas telekomunikasi, dan pusat layanan internet tergantung sepenuhnya pada elite desa yang ternyata tidak merepresentasikan kepentingan publik setempat. Akhirnya, banyak fasilitas telekomunikasi yang dipasang di rumah perangkat desa atau tokoh desa sehingga banyak warga yang memahami bahwa bantuan fasilitas itu memang ditujukan untuk para elit desa. Idealnya, fasilitas telekomunikasi yang dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat mestinya ditempatkan di lokasi umum yang menjadi ruang publik. Tujuannya agar warga masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang ada secara leluasa, tanpa adanya perasaan takut atau bentuk tekanan psikologis lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa pelaksanaan program ini kurang sosialisasi. Akibatnya, warga masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran utama dari program desa informasi ternyata banyak yang tidak mengetahui dan kurang merasa memiliki. Banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui tahu bahwa

bantuan fasilitas telekomunikasi yang diterimanya itu nantinya akan dikelola secara swadaya oleh warga. Dalam persepsi warga desa, fasilitas tersebut hanya sebagai bantuan dari pemerintah kepada warga desa, bukan untuk dikelola secara mandiri oleh warga. Akibat lebih jauh, warga desa pun kurang merasa memiliki terhadap berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah, sehingga program-program tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai ilustrasi, radio komunitas jarang melakukan siaran rutin, karena setelah sekian lama pengelolanya tidak diberi imbalan. Mereka tidak mengetahui sejak awal, bahwa pengelolaan radio komunitas dan internet harus dikelola secara mandiri oleh mereka sendiri.

Oleh karena itu pemanfaatan dan program yang terkait dengan Desa Informasi itu secara umum dapat dikatakan kurang optimal. Akses warga yang menjadi komunitas sasaran program ini masih tergolong rendah, sehingga perilaku budaya dan perkembangan peradaban desa yang berbasis pengetahuan juga belum terjadi. Kontribusi program Desa Informasi terhadap upaya transformasi budaya dalam merespons masalah kehidupan yang dihadapi sehari-hari masih belum signifikan. Dalam pada itu tujuan agar meningkatkan rasa kebangsaan di desa-desa perbatasan juga terasa masih minimal. Sementara itu pengelolaan secara mandiri terhadap berbagai program Desa Informasi oleh warga komunitas sendiri juga belum terjadi, sehingga Desa Informasi belum mengorbit.

Salah satu sebab masih kurang optimalnya program tersebut terutama sekali lagi adalah, kurang memperhatikan aspek sosial budaya, terutama melakukan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan. Lembaga-lembaga sosial desa yang kredibel dan aktif kurang dilibatkan dalam pengelolaan program Desa Informasi, sehingga partisipasi warga kurang terasa. Sejak awal pendekatannya terkesan masih atas-bawah, diterminisme teknologi, dan kurang memperhatikan partisipasi publik.

Akibat minimnya partisipasi publik, maka aspek kelembagaan yang seharusnya menjadi pengelola program Desa Informasi kurang mendapat perhatian, bahkan cenderung diabaikan. Desa Informasi sebagai suatu program baru yang datang dari atas, bukan atas inisiatif masyarakat sesungguhnya membutuhkan penanganan ekstra. Pada tahap pertama, masyarakat harus mendapatkan sosialisasi yang memadai untuk mengetahui detail dari program tersebut. Selanjutnya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas telekomunikasi yang telah tersedia di Desa Informasi untuk tujuan pencerdasan, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas ekonomi warga. Untuk sampai ke arah itu, sudah tentu terlebih dahulu perlu dilakukan berbagai pelatihan bagi warga masyarakat.

Gambaran ideal itu dapat terwujud jika proses pembangunan Desa Informasi dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang, terutama memerhatikan aspek kelembagaan yang diharapkan menjadi pengelola program. Bahkan dapat dikata-

kan, program Desa Informasi akan berjalan lebih efektif jika terlebih dahulu disiapkan aspek kelembagaannya yang meliputi perumusan tujuan program, struktur organisasi, sumber daya manusia yang akan mengelola, dan sumber pembiayaan yang diharapkan dapat menopang kehidupan organisasi. Tanpa memerhatikan aspek kelembagaan secara memadai, rasanya berat sekali jika terlalu mengharap tercapainya tujuan Desa Informasi seperti yang dicanangkan pada awalnya.

PENUTUP

Mengingat kebutuhan akan informasi di masa depan bersifat imperatif atau suatu keniscayaan, maka program Desa Informasi perlu terus dilanjutkan dan dikembangkan. Konsep pengelolaan dan pengembangan Desa Informasi perlu mempertimbangkan asumsi diterminisme sosial yang memiliki karakter *bottom-up*. Oleh karena itu langkah-langkah penetapan Desa Informasi adalah mulai dari identifikasi lokasi, identifikasi lembaga publik di lokasi, kesediaan mandiri, dan adanya kaitan antarlembaga baik secara vertikal maupun horizontal. Baru setelah prosedur dari bawah tersebut memenuhi syarat, maka pihak pusat (Jakarta) yang menentukan, setelah mempertimbangkan input dari bawah tersebut.

Langkah-langkahnya mulai dari indentifikasi lokasi harus benar-benar dijalankan secara konsisten. Penentuan desa informasi misalnya, harus memenuhi kriteria utama, seperti desa perbatasan, terisolasi, dan terpencil. Setelah itu melau-

kukan identifikasi lembaga publik di desa yang memenuhi kriteria seperti eksistensinya terbentuk secara swadaya; bersifat aktif, responsif dan bertanggung jawab terhadap kepentingan umum; menjadi arena pengambilan keputusan; dan keputusan bersama mewadahi keragaman kelompok kepentingan (petani, nelayan, pedagang, pengusaha, dll).

Langkah berikutnya adalah menawarkan semacam kontrak komitmen kepada Desa Informasi tertunjuk yang isinya adalah, adanya komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai desa informasi; ada cita-cita bersama dan keinginan untuk maju (*need of achievement*); dan jaminan dari warga akan keberlanjutan sebagai desa informasi sampai mengorbit.

Kemudian juga perlu diberikan pemahaman kepada warga desa bahwa lembaga-lembaga sosial yang terlibat tersebut harus bersedia melakukan koordinasi dengan mitra strategis. Sedangkan pusat (Kemkominfo) juga bersedia berkoordinasi dengan negara-negara tetangga perbatasan; dan antara pusat dan desa yang bersangkutan harus lingked dengan lembaga lain dalam memberdayakan komunitas sasaran, misalnya keterhubungan antara Deperindag dan dunia usaha untuk menjadi mitra strategis Desa Informasi dalam membina dan memasarkan produk-produk komoditas strategis hasil binaan program Desa Informasi. Sebagai contoh, jika Desa Informasi berhasil mengembangkan minuman dari blimbing berkat akses informasi dan belajar dari internet, maka Deperindag dan dunia usaha harus bersedia membe-

rikan jaminan pasar yang dipayungi oleh kebijakan pemerintah.

Begitulah, dengan langkah-langkah dari bawah ke atas itu, maka pengelolaan dan pengembangan program Desa Informasi akan mampu memberdayakan warga masyarakat desa. Berbagai peralatan canggih yang telah disalurkan sebagai bantuan negara kepada rakyatnya akan dimanfaatkan secara kreatif dan inovatif, sehingga program Kemkominfo bertajuk Desa Informasi akan dapat mencapai tujuan secara optimal.

151721-menkominfo-resmikan-14-
desa-informasi

<http://regional.kompas.com/read/2011/01/24/05500172/4.Des.Informasi.Bengkayang.Diresmikana>

Daftar Pustaka

Castells, M. 1996. *The Information Age: Economy, Society & Culture*, Vol. 1: *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.

Fortier, Francois, 2001, *Virtuality Check: Power Relations and Alternatif Strategies in Information Society*, London:Verso.

McQuail's, Denis, 2005, *Mass Communication Theory*, Fifth Edition, London: Sage Publications.

Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. (Terj). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Sumber Lain:

<http://id.mg60.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=1fd4ocj2f8331>

<http://www.bengkayangkab.go.id/news/view/79>

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/12/12/>